



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI MANADO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ENDANG KRISTIANINGSIH**
2. Jabatan : **PANITERA PENGGANTI**
3. NHK : **479425**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **2.100.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m²/36 m² di KOTA MANADO ,
HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m²/36 m² di KOTA MANADO ,
HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 151 m²/180 m² di KOTA MANADO ,
HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 143 m²/72 m² di KOTA MANADO ,
HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m²/36 m² di KOTA MANADO ,
HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 255 m²/125 m² di KOTA MANADO ,
HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **28.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 2001, HASIL SENDIRI
Rp. 20.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 125 CC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000
3. MOTOR, HONDA TIGER 200 CC Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **65.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **4.000.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**



Sub Total	Rp.	2.197.000.000
III. HUTANG	Rp.	765.984.500
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.431.015.500

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.